

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan terbesar yang dialami Indonesia saat ini adalah korupsi. Perkembangan korupsi sampai saat ini makin mudah ditemukan di berbagai bidang kehidupan. Hal ini dapat dilihat dari jenis dan tempat ditemukannya kasus korupsi. Korupsi tidak hanya ditemukan pada organisasi sektor publik, pada organisasi swasta juga pernah ditemukan terjadinya tindakan kecurangan atau tindakan tidak etis. Melihat semakin maraknya tindakan kecurangan, membuat melaporkan tindakan tidak etis itu menjadi suatu hal yang penting. Ada beberapa persoalan yang menjadi penyebab meluasnya kejahatan korupsi di Indonesia. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial dan yang kedua tidak ada transparansi dan tanggung gugat system integritas publik. Kepentingan pribadi menjadi menjadi lebih utama dibanding kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian besar orang. Birokasi pelayanan publik justru digunakan oleh pejabat publik untuk mengejar ambisi politik pribadi, semata-mata demi promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Sementara kualitas dan kuantitas pelayanan publik bukan prioritas dan orientasi yang utama.

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA) telah mendapat banyak perhatian media sebagai dinamika yang sering terjadi. Terdapat opini bahwa KKA dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi dalam definisi dan terminologi karena

keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari pengungkapan fakta-fakta menyesatkan, pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan, dan fakta kritis. Indikasi adanya KKA dapat dilihat dari bentuk kebijakan yang disengaja dan tindakan yang bertujuan untuk melakukan penipuan atau manipulasi yang merugikan pihak lain. KKA meliputi berbagai bentuk, seperti tendensi untuk melakukan tindak korupsi, tendensi untuk penyalahgunaan aset dan tendensi untuk melakukan pelaporan keuangan yang menipu.

Menurut data yang diambil dari Sinar Harapan, Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mencatat selama tahun 2012 ada 215 kasus dugaan korupsi yang tersebar 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Jumlah kasus korupsi yang terungkap itu, naik lebih dari 100 persen dibanding kasus yang terungkap di 2011, yakni sebanyak 102 kasus korupsi. KP2KKN hanya berhasil menghitung kerugian keuangan negara 71 persen dari 215 kasus itu, dari 71 persen itu terdapat kerugian negara sebesar Rp 381 M. Kasus korupsi yang mencuat ke publik khusus di Jawa Tengah diantaranya Kabupaten Semarang, Karanganyar, Klaten, Surakarta, Kabupaten Grobogan, Purworejo dan Kudus. Sedangkan pada tahun 2013 kasus korupsi melonjak menjadi 222 kasus dengan kerugian sebesar Rp 111 M yang tersebar di 35 kota/kabupaten di Jawa Tengah. Modus yang digunakan dalam melakukan korupsi paling banyak adalah penyalahgunaan wewenang sebanyak 100 kasus, pengadaan barang/jasa 98 kasus, dan kegiatan fiktif 20 kasus (<https://antikorupsijateng.wordpress.com>).

Kabupaten Kudus menjadi salah satu Kabupaten yang terkena kasus dugaan korupsi di Jawa Tengah. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa kasus dugaan korupsi yang menyita perhatian publik hingga ke pengadilan. Seperti kasus dugaan korupsi proyek fiktif Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kudus yang diperkirakan merugikan negara Rp 1,6 miliar. Proyek yang diduga bermasalah tersebut adalah proyek perbaikan dan normalisasi Sungai Gelis, Desa Besito, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, senilai Rp 978 juta dan proyek perbaikan dan normalisasi sungai di Dukuh Kauman, Desa Besito, Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, senilai Rp 750 juta. Kasus lain yaitu tentang dugaan korupsi Mantan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus. Kasus dugaan korupsi logistik fiktif tersebut bermula saat adanya pengadaan logistik tahun 2012. Namun dalam pelaksanaannya, pengadaan logistik senilai Rp 197 juta tersebut diselewengkan oleh oknum BPBD Kudus (infokorupsi.com).

Hidayati (2016) memaparkan, bahwa profesi akuntansi sebagai penyedia informasi yang seharusnya memberikan informasi yang terpercaya bagi para pengguna laporan keuangan, dan adanya kegagalan terhadap penyediaan informasi yang terpercaya bagi para pengguna laporan keuangan mengakibatkan kerugian yang dikarenakan para pengguna laporan keuangan mendasarkan keputusannya dari informasi yang disajikan oleh profesi akuntansi. Semendawai (2011) dalam bukunya yang berjudul “Memahami *Whistleblower*” menjelaskan bahwa lembaga atau badan pelayanan publik di sektor pemerintahan cukup rawan terjadi dugaan praktik penyalahgunaan wewenang, pelanggaran, atau tindak

pidana. Oleh karena itu, tindakan pengawasan terhadap praktik administrasi dan keuangan pada lembaga sektor pemerintahan sangat penting dilakukan guna meminimalisir terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Dalam penelitian Setiawati (2016) menyebutkan salah satu cara mencegah pelanggaran akuntansi sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah dugaan melakukan *whistleblowing*. *Whistleblowing* merupakan fenomena yang sangat kompleks, karena menyangkut antara situasi, pelapor dan terlapor, serta organisasi. *Whistleblowing* menurut Komisi Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah pengungkapan tindak pelanggaran atau perbuatan tindak pidana hukum, peraturan, pedoman praktis, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan wewenang dan perbuatan tidak etis atau tidak bermoral yang merugikan berbagai pihak yang berkepentingan, yang dilakukan oleh pegawai kepada individu atau lembaga lain yang dapat memberikan efek tindakan perbaikan.

Seseorang yang melakukan *whistleblowing* disebut pelapor pelanggaran sebagai *whistleblower* (Sagara,2013). Seseorang dapat dikatan sebagai *whistleblower* harus memenuhi dua kriteria mendasar. Kriteria pertama, *whistleblower* menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik. Dengan mengungkap kepada otoritas yang berwenang atau publik diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar. Kriteria kedua, seorang *whistleblower* merupakan orang ‘dalam’, yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang

terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada. Karena skandal kejahatan selalu terorganisir, maka seorang *whistleblower* kadang merupakan bagian dari pelaku kejahatan atau kelompok mafia itu sendiri. Dia terlibat dalam skandal lalu mengungkapkan kejahatan yang terjadi (Sagara,2013).

Komitmen profesional diyakini dapat mempengaruhi intensi pegawai untuk melakukan *whistleblowing*. Komitmen profesional merupakan salah satu variabel penting bagi seorang pegawai untuk melakukan apa yang terbaik bagi organisasi. Elias Rafik Z (2008) menyatakan bahwa level komitmen profesi mempengaruhi level landasan etis. Lebih lanjut, Kaplan dan Whitecotton (2001) dalam Risti Merdikawati (2012:28) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara komitmen profesional dan niat auditor dalam melakukan *whistleblowing*. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa akuntan yang lebih berkomitmen terhadap profesinya lebih memiliki kecenderungan untuk melaporkan pelanggaran.

Sosialisasi antisipatif merupakan suatu proses penyesuaian diri dan keyakinan dari kelompok tertentu sebelum masuk dalam lingkungan baru, termasuk dalam lingkungan kerjasejak mereka masih dalam masa pendidikan (Elias, 2008). Garavan dan Morley (1997) menerangkan dalam proses sosialisasi antisipatif dapat membentuk ekspektasi terhadap suatu karir, karena selama proses sosialisasi individu mengantisipasi sikap-sikap, norma-norma, dan nilai-nilai dari suatu profesi yang akan dimasukinya, ini merupakan hasil dari pembelajaran yang diterima oleh seorang individu sebelum hari pertama dia bekerja (Sang, 2009). Elias (2008) melakukan penelitian yang menguji hubungan komitmen profesi dan

sosialisasi antisipatif dengan *whistleblowing* pada mahasiswa akuntansi di dua univeritas, dan hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa yang lebih berkomitmen profesi dan tersosialisasi dengan profesinya sejak dini lebih cenderung melakukan *whistleblowing*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Swandhika Ninggar Pangesti dan Sri Rahayu (2017). Meski demikian, penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Swandhika Ninggar Pangesti dan Sri Rahayu (2017) yaitu penelitian ini menambah variabel independen faktor organisasional dan lingkungan etika. Selain itu perbedaan lain penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek penelitian yang sebelumnya pada mahasiswa akuntansi Universitas Telkom di Bandung tahun akademik 2015/2016, sedangkan objek pada penelitian ini pada pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kudus. Alasan pemilihan objek penelitian pada pegawai OPD karena semakin banyaknya kasus kecurangan akuntansi yang melibatkan Pemimpin dan pegawai Daerah, maka penting dilakukan penelitian kecurangan akuntansi yang melibatkan instansi pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH KOMITMEN PROFESIONAL, SOSIALISASI ANTISIPATIF, FAKTOR ORGANISASIONAL DAN LINGKUNGAN ETIKA TERHADAP *WHISTLEBLOWING* (STUDI EMPIRIS PADA PEGAWAI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KUDUS)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Agar pelaksanaan penelitian dapat terfokus, maka ruang lingkup penelitian ini diorientasikan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan penelitian mengambil objek pegawai Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus.
2. Dalam melakukan penelitian ini menitikberatkan pada permasalahan yang berkaitan pada komitmen profesional, sosialisasi antisipatif, faktor organisasional dan lingkungan etika terhadap *whistleblowing*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan di dalam latar belakang, terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi sorotan bagi penulis, bagian yang menjadi sorotan permasalahan bagi penulis yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh komitmen profesional terhadap *whistleblowing* pada pegawai Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus?
2. Apakah terdapat pengaruh sosialisasi antisipatif terhadap *whistleblowing* pada pegawai Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus?
3. Apakah terdapat pengaruh faktor organisasional terhadap *whistleblowing* pada pegawai Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus?
4. Apakah terdapat pengaruh lingkungan etika terhadap *whistleblowing* pada pegawai Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menguji secara empiris komitmen profesional terhadap *whistleblowing* pada pegawai Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus.
2. Untuk menguji secara empiris sosialisasi antisipatif terhadap *whistleblowing* pada pegawai Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus.
3. Untuk menguji secara empiris faktor organisasional terhadap *whistleblowing* pada pegawai Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus.
4. Untuk menguji secara empiris lingkungan etika terhadap *whistleblowing* pada pegawai Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi perkembangan literatur akuntansi, penelitian ini memberikan masukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi intensi pegawai melakukan tindakan *whistleblowing*.
2. Bagi manajemen perusahaan, dengan memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi intensi pegawai melakukan tindakan *whistleblowing* diharapkan manajemen perusahaan dapat memilih seorang pegawai yang profesional sehingga dapat melakukan tindakan *whistleblowing* sebagaimana mestinya. Dengan direkrutnya pegawai yang

profesional, diharapkan kelangsungan hidup perusahaan dapat lebih baik dan jauh dari skandal-skandal kecurangan.

3. Bagi karyawan, sebagai tinjauan yang diharapkan dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan intensi melakukan *whistleblowing* dalam menjalankan tugasnya.
4. Bagi mahasiswa akuntansi, penelitian ini berguna untuk bahan diskusi mahasiswa akuntansi dan sebagai bahan pembelajaran. Penelitian ini juga bisa dijadikan bahan referensi untuk penelitian berikutnya.
5. Bagi para akademisi dan peneliti, penelitian ini memberikan masukan bagi perkembangan pendidikan akuntansi terutama di bidang auditing.

